

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Wilayah

Secara geografis kecamatan Rupaat terletak pada posisi $02^{\circ}00'00''$ - $01^{\circ}42'00''$ LU dan $100^{\circ}13'00''$ - $101^{\circ}47'00''$ BT dengan perbatasan sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan selat Malaka dan sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan selat Rupaat. Ketinggian tanah dari permukaan laut rata-rata 0-2.5 meter, wilayahnya merupakan dataran rendah, iklim daerah ini seperti daerah lainnya di Indonesia, merupakan daerah yang beriklim tropis, musim hujan umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau terjadi antara bulan april sampai bulan September, dengan hari paling basah antara bulan November-Januari. Kisaran suhu daerah ini sekitar rata-rata 31°C , curah hujan per tahun antara 2000-3000 mm/tahun.

Berdasarkan pergerakan angin, ada empat musim yang ada di daerah ini yaitu: 1) angin musim Barat, dari bulan September sampai bulan Desember, angin bertiup lemah dan ombak tidak begitu besar; 2) angin musim Utara, dari bulan Desember sampai bulan Maret, angin bertiup kencang dan ombak besar; 3) angin musim Timur, dari bulan Maret sampai bulan Juni, angin bertiup lemah dan ombak kecil dan 4) angin musim Selatan, dari bulan Juni sampai bulan September angin bertiup lemah dan ombak kadang kala kecil dan kadang kala besar. Pada waktu kemarau angin sangat kencang dan kadang-kadang bergelombang, namun menurut masyarakat setempat, arah angin ini jelas arah angin sangat beraturan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan melabukan kegiatan penangkapan ikan di Rupaat.

luas wilayah desa meliputi desa atas wilayah desa Tanjung Medang 6.600 ha dan desa bawah sekitar 7.250 ha, kemudian naik ke pusat pemerintahan Tanjung Medang ke kecamatan 10 km dan kabupaten 47 km, sedangkan Sungai Cingam ke kecamatan 48 km dan kabupaten 71 km. Akses jalan ke desa-desa ini relatif jauh dan perhubungan hanya dapat ditempuh melalui jalur laut dengan sarana transportasi kapal motor rute Tanjung dengan frekuensi satu kali sehari. Jika ditinjau dari jarak dan transportasi desa dapat dikatakan terisolir.

4.2. Penduduk dan Mata Pencarian

Sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dasar dan merupakan faktor Produksi yang paling utama dalam suatu sistem produksi. Untuk mencapai produktifitas yang tinggi, kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia mutlak diperlukan disamping faktor lainnya. Ketersediaan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah dan tingkat perkembangan penduduk.

Jumlah penduduk desa Tanjung Medang sekitar 1.658 jiwa dan Sungai Cingam 2.012 jiwa dengan kepadatan 25-25 jiwa per km² dan boleh dikatakan penduduknya masih jarang. Adapun pekerjaan penduduk di kedua desa ini sebagai perikanan, pertanian, buruh, wiraswasta jasa dan pegawai negeri, mayoritas penduduk Tanjung Medang sebagai nelayan 360 jiwa (67,2 %) sedangkan Sungai Cingam sebagai pertanian 380 jiwa (66,0%). Kedua lapangan kerja ini dikarenakan kurang terdapatnya lapangan kerja disektor lain.

4.3. Usaha Perikanan

Usaha perikanan yang ada di Tanjung Medang dan Sungai Cingam bergerak dalam bidang penangkapan ikan di laut (nelayan) sedangkan budidaya belum ada.

4.3.1 Penangkapan ikan

Keberhasilan usaha penangkapan ikan ditentukan oleh jumlah, jenis, armada dan alat tangkap yang digunakan. Terbatasnya armada penangkapan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap daerah penangkapan dan akan berdampak pada hasil tangkapan yang diperoleh. Menurut IRAWAN *et al* (1988) bahwa peranan saran penangkapan yang dipergunakan dalam operasi penangkapan sangat berpengaruh terhadap jam kerja dan produksi, sehingga berpengaruh terhadap hasil dan pendapatan yang diterima nelayan.

Armada penangkapan yang terdapat di Tanjung Medang terdiri dari Perahu tanpa motor 2 unit dan kapal motor 13 unit, sedang kapan Sungai Cingam Perahu tanpa motor 5 unit Motor tempel 2 unit dan kapal motor 3 unit, kapal motor bentuk pompong dengan besar kapal 2-7 G.F.

Sedangkan alat tangkap yang ada adalah gillnet, rawai dan trammel net dengan jumlah untuk Tanjung Medang gillnet 18 unit dan trammel net 8 unit, kemudian di Sungai Cingam Gillnet 10 unit, rawai 3 unit dan trammel net 2 unit. Gillnet yang ada mencapai 50 piece per unit dan dimiliki oleh penduduk asli atau suku akit dan perkembangannya hampir tidak ada.

Operasi penangkapan dilakukan di selat Malaka dan rata-rata dalam satu bulan berkisar 16 trip, operasi penangkapan dapat dilakukan sepanjang tahun, namun yang efektif berkisar antara 8-10 bulan per tahun dan menurut keterangan nelayan bahwa musim puncaknya bulan November sampai Pebruari dimana selama priode tersebut hasil tangkapannya lebih banyak dibandingkan bulan lainnya.

4.3.2 Kegiatan ekonomi nelayan

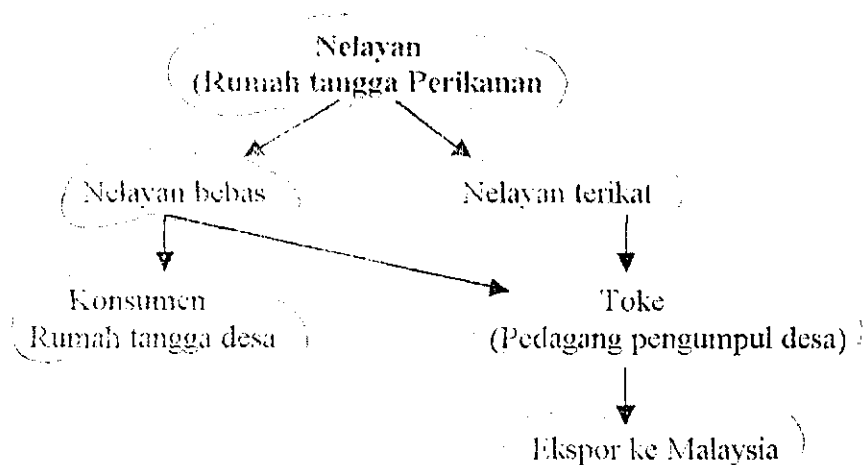
Kelancaran pemasaran produksi perikanan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha penangkapan serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan yang berada di wilayah desa pantai. Sistem pemasaran ikan di daerah ini didominasi oleh toke, dengan jaringan pemasaran antara toke tingkat desa dan toke kota dalam maupun luar negeri. Pada umumnya toke lokal adalah pengusaha non pribumi keturunan Cina yang berfungsi sebagai pedagang pengumpul tingkat desa atau kecamatan dan bertindak juga sebagai eksportir legal maupun ilegal serta pemilik bangliau (industri pengolahan ikan) dan ada kalanya memberikan kredit kepada nelayan. Umumnya mereka memiliki usaha penangkapan dan fasilitas pendaratan tersendiri. Hal ini dapat dilakukan toke karena di dukung oleh beberapa faktor diantaranya toke memiliki modal yang cukup kuat dan aksesnya terhadap informasi tinggi serta lokasi desa tempat mereka tinggal dekat dengan Malaysia.

Dalam melakukan transaksi penjualan ikan dengan toke, nelayan dapat dibedakan menjadi dua yaitu nelayan terikat dan nelayan bebas. Bagi nelayan bebas wajar akan mencari pembeli yang bersedia membayar dengan tingkat harga yang lebih tinggi, namun dalam penetapan harga ikan cenderung tidak melalui proses tawar menawar. Harga ikan ditentukan oleh toke, sedangkan nelayan adalah sebagai penerima harga.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa posisi nelayan sangat lemah dalam sistem pemasaran ikan. Menurut MINTORO *et al.* (1993) ketidak berdayaan nelayan menghadapi pelaku pemasaran secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu karena nelayan memiliki hubungan hutang piutang dan diperburuk oleh akses nelayan yang lemah terhadap pasar. Dari hasil wawancara disamping terikat hutang juga disebabkan

tidak adanya pembeli lain selain toke sehingga tidak ada pilihan lain dan hasil tangkapan harus dijual guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saluran pemasaran ikan di Tanjung medang relatif pendek dan sederhana. Pada umumnya hasil tangkapan nelayan berorientasi ekspor, kecuali nelayan tradisional yang langsung menjual ikan kepada konsumen rumah tangga desa, sedangkan nelayan yang menggunakan kapal motor menjual ikan kepada toke (pedagang pengumpul) yang bertempat tinggal di desa yang sama Gambar 1.



Gambar 1. Saluran pemasaran ikan di desa Tanjung Medang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen nelayan telah terikat dengan toke dan 20 persen diantaranya dapat melakukan transaksi penjualan secara bebas. Namun demikian masing-masing nelayan telah memiliki toke, meskipun hubungannya hanya sebatas langganan. Dengan adanya hubungan kerja sama melalui ikatan kontrak informal antara toke dan nelayan menunjukkan bahwa antara toke masih terjadi persaingan untuk mendapatkan pasokan ikan dari nelayan.

Kegiatan pemasaran ekspor dilaksanakan toke PT. Adi Wiraguna Usaha Tama yang bekerja sama dengan KUD Mandiri Rupert yang berkedudukan di Tanjung Medang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh sumber keuangannya dikuasai toke (pengusaha) yang berdomisili di Malaysia yaitu toke pertama yang memberi kredit berupa sarana penangkapan kepada para nelayan di Kecamatan Rupat lainnya adalah toke-toke skala kecil yang bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) di bawah binaan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Riau atau para pedagang pengumpul ekspor skala kecil lainnya. Toke-toke yang tergabung dalam KUBA dan toke skala kecil tersebut melakukan kegiatan ekspor masih bersifat ilegal. Hal ini disebabkan mereka kesulitan dalam memperoleh surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin kapal perikanan (SIKPP) tentang penangkutan dan pengumpulan hasil laut. Penetapan harga ikan di desa Tanjung Medang biasanya berdasarkan harga di Malaysia. Sehingga tingkat harga yang berlaku relatif stabil. Harga yang diterima nelayan berkisar antara Rp 3.500,- sampai Rp 13.500,- per kg sesuai jenis ikan yang diperjual belikan. Ternyata nelayan terikat menerima harga lebih rendah sekitar 12,5 sampai 22,2 persen per kg dibandingkan nelayan bebas.

Berdasarkan informasi bahwa terjadinya perbedaan harga ini bukan saja disebabkan nelayan telah menerima kredit, tetapi juga disebabkan toke PT. Adi Wiguna Usaha Tama melakukan kegiatan ekspor secara legal, sehingga harus mengeluarkan biaya pemasaran yang relatif besar baik untuk pengeluaran resmi maupun tidak. Biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada nelayan dalam bentuk penekanan harga pembelian. Sementara toke skala kecil, karena melakukan kegiatan ekspor secara ilegal, sehingga untuk mendapatkan pasokan ikan mereka bersedia membeli dengan tingkat harga yang lebih tinggi.

Sistem pembayaran dapat dibedakan yaitu nelayan bebas dapat menerima hasil penjualan ikan secara tunai karena toke membayarnya pada waktu transaksi berlangsung. Sebaliknya nelayan terikat pembayarannya dilakukan setiap bulan atau setelah melakukan 2 trip penangkapan. Namun nelayan dapat meminjam uang untuk kebutuhan keluarga pada waktu akan melakukan operasi penangkapan.

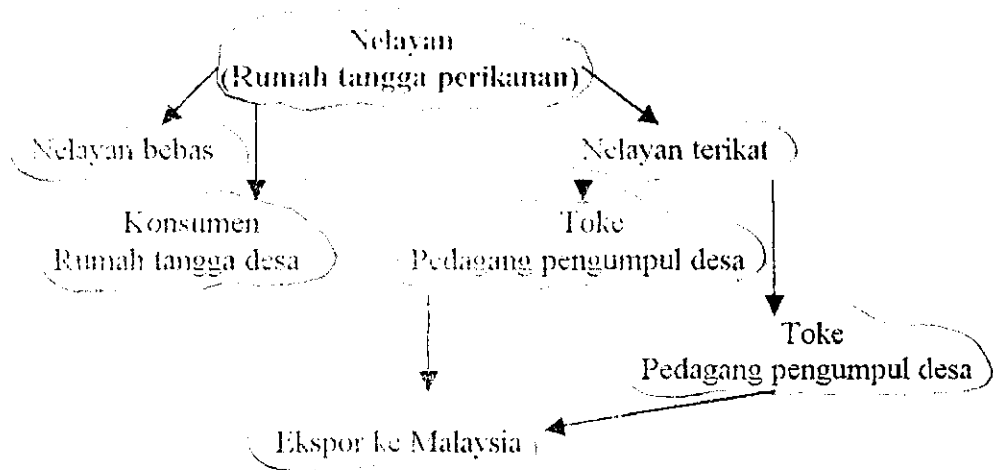
Tempat pelelangan ikan (TPI) yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk keperluan pelelangan ikan yang dibangun di desa Tanjung Medang dan sampai saat ini belum pernah beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Akibatnya bangunan TPI serta fasilitas penunjangnya tidak terawat dan rusak. Tidak dimanfaatkannya TPI oleh nelayan disebabkan antara lain 1) sebagian besar para nelayan telah terikat kepada toke sejak puluhan tahun yang lalu serta memberikan pelayanan pemasaran yang efisien dan pelayanan lainnya kepada nelayan. 2) pada umumnya yang bertindak sebagai pembeli hasil tangkapan nelayan adalah toke desa setempat yang memiliki fasilitas pendaratan dan dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang yang dibutuhkan. 3) penjualan ikan melalui toke dapat dilakukan setiap waktu dan ada kalanya hasil tangkapan tersebut langsung dijemput toke ke tengah laut (daerah penangkapan dan 4) tidak dirasakananya manfaat TPI secara langsung oleh nelayan. Dari kenyataan tersebut bahwa pembangunan TPI yang berasal dari atas tidak memperhatikan tata nilai atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat nelayan setempat, sehingga proyek pembangunan TPI tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat nelayan.

Selain TPI juga terdapat KUD Mandiri yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kecamatan Rupert. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan antara lain yaitu 1) pemasaran ekspor hasil-hasil perikanan. 2) usaha waswda kebutuhan pokok penduduk desa

setempat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh KUD Mandiri Rupat dapat berfungsi karena memiliki izin ekspor perikanan. Kenyataannya KUD tersebut tidak terlibat langsung dalam melakukan ekspor perikanan. Kegiatan ekspor dilaksanakan oleh toke PT. Adi Wiraguna Usaha Tama, sebagai kompensasinya KUD menerima fee sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Dari hasil penerimaan fee tersebut, KUD melakukan kegiatan usaha waserda yang menjual barang-barang kebutuhan pokok penduduk setempat. Berdasarkan pengamatan, waserda yang dikelola KUD tidak lebih dari warung yang terdapat di daerah pedesaan lainnya. Selain barang-barang yang diperjual belikan tidak lengkap, juga tidak melibatkan nelayan sebagai anggotanya dalam berbagai kegiatan. Pada hal KUD merupakan organisasi ekonomi nelayan yang seyogyanya harus dikelola oleh masyarakat nelayan sebagai anggotanya. Ini terbukti semua nelayan responden yang menjadi anggota KUD, mengaku belum pernah merasakan adanya manfaat yang diperoleh dari KUD tersebut, bahkan ada diantara mereka yang bersikap diam. Fenomena ini menunjukkan bahwa KUD mandiri tidak mampu menolong masyarakat nelayan dalam wilayah kerjanya dan disinyalir telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut ANWAR (1995) kebanyakan kegagalan organisasi seperti KUD yang terdapat di wilayah pedesaan, terutama disebabkan karena pineang (terkonsentrasi) penyebaran manfaat bersih antara pengurus dengan para anggotanya. Dari segi keadilan di nilai terdapat keganjilan, sehingga organisasi tersebut tidak dapat bekerja dengan lancar.

Kondisi di Sungai Cingam relatif sama dengan di Tanjung Medang. Pada umumnya hasil tangkapan nelayan berorientasi ekspor, kecuali nelayan tradisional. Nelayan tradisional sebagian langsung menjual ikan kepada konsumen rumah tangga setempat secara door to door, sedangkan nelayan yang menggunakan kapal motor

menjual ikan kepada toke untuk tujuan ekspor, baik toke yang berada di desa maupun di Tanjung Medang (Gambar 2).



Gambar 2. Saluran pemasaran di desa Sungai Cingam

Di desa Sungai Cingam hanya terdapat satu orang toke skala kecil yang melakukan kegiatan ekspor secara ilegal. Toke tersebut selain bertindak sebagai pembeli utama hasil tangkapan nelayan juga memberikan pinjaman uang tanpa bunga untuk memperbaiki sarana penangkapan kepada nelayan. Dengan struktur pasar yang bersifat monopronistik, memungkinkan bagi toke untuk menetapkan harga yang paling menguntungkan secara sepihak. Harga ikan yang diterima nelayan terikat berkisar Rp 2.000 – Rp 4.000,- per kg dan ini lebih rendah dari 12,5 persen dibandingkan dengan nelayan bebas (Tabel 1). Penjualan dilakukan secara tunai, karena toke langsung membayar pada waktu transaksi berlangsung.

Adanya kecenderungan nelayan menjual ikan dan melakukan hubungan kerjasama melalui ikatan kontrak informal dengan toke desa Tanjung Medang menunjukkan

keinginan mereka untuk meningkatkan pendapatan melalui tingkat harga yang lebih tinggi serta kemudahan untuk mendaratkan modal usaha dan kebutuhan lainnya.

Tabel 1. Harga ikan menurut jenis dan lokasi

Jenis Ikan	Harga ikan (Rp/kg)			
	Laut/Laut Medang		Sungai Cingam	
	Nelayan bebas	Nelayan terikat	Nelayan bebas	Nelayan terikat
Tengiri	4.500	5.500	4.000	4.500
Parang-parang	4.500	5.500	4.000	4.500
Kerapu	5.000	5.700	-	-
Senohong	12.000	13.500	-	-
Kurau	8.000	9.000	-	-
Tengiri sisik	-	-	2.000	2.500
Parang-parang s	-	-	2.000	2.500

Sehubungan dengan peranan toke yang sangat menentukan tingkat kehidupan masyarakat nelayan yang berbeda dalam wilayahnya. Pada satu sisi mereka berfungsi sebagai lembaga pemasaran yang mampu menjangkau nelayan di desa pantai yang terisolir dan sekaligus memasarkan hasil tangkapan mereka. Selain itu berperan sebagai kredit informal. Pada sisi lain dapat merugikan masyarakat nelayan karena penentuan harga ikan yang tidak berjalan melalui tawar-menawar dalam kedudukan yang seimbang. Toke selalu berada pada kedudukan yang lebih kuat, sehingga tawar-menawar yang lebih terbuka dan adil tidak pernah terjadi.

Banyak faktor yang menyebabkan kuatnya posisi toke dalam penentuan harga ikan antara lain 1) Kuatnya kedudukan toke di dalam struktur pasar yang bersifat kurang

bersaing bahkan mengarah ke pada monopoli. 2) nelayan terikat hutang dengan toke, sehingga dalam pemasaran nelayan berada pada posisi yang sangat lemah dan 3) sulitnya sarana transportasi dan ketidak cukupan pelayanan informasi pasar serta hasil tangkapan nelayan sedikit, sehingga mengakibatkan biaya pemasaran dan transportasi menjadi tinggi. Kesemuanya ini dibebankan toke kepada nelayan melalui penetapan tingkat harga yang lebih rendah.